



Katalog BPS : 9205.7371

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGGUNAAN
KOTA MAKASSAR
2010**



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2011**



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KATA PENGANTAR

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto menurut penggunaan Kota Makassar tahun 2010 dapat digunakan untuk berbagai hal, baik untuk perencanaan maupun evaluasi hasil pembangunan.

Terbitnya publikasi Produk Domestik Regional Bruto menurut penggunaan Kota Makassar tahun 2010 ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta.

Publikasi ini terbit merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini BAPPEDA Kota Makassar dengan Badan Pusat Statistik Kota Makassar.

Kepada semua pihak yang telah membantu kami sehingga publikasi ini dapat diterbitkan diucapkan banyak terima kasih.

Makassar, Nopember 2011

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Makassar
Kepala

DRS. H.M. IDRIS PATARAI, M.Si
NIP: 195712311988031052



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MAKASSAR**

KATA PENGANTAR

Dalam Publikasi Produk Domestik Regional Bruto menurut penggunaan Kota Makassar tahun 2010 ini, dijelaskan bagaimana produk yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi digunakan untuk konsumsi rumahtangga, konsumsi lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, dan ekspor neto.

Terbitnya publikasi ini berkat adanya kerjasama antara pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Bappeda Kota Makassar dengan BPS Kota Makassar.

Kepada semua pihak yang telah membantu kami sehingga publikasi ini dapat diterbitkan diucapkan banyak terima kasih. Saran dan kritik dari pengguna data sangat diharapkan untuk perbaikan publikasi selanjutnya.

Makassar, Nopember 2011

Badan Pusat Statistik
Kota Makassar
Kepala

H. ABD. Haris, SE
NIP: 196612311993011001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Lampiran Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I. KONSEP DEFENISI DAN METODE PENGHITUNGAN	
1.1 KONSEP DEFINISI	1
1.1.1 PDRB Menurut Penggunaan	1
1.1.2 Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	2
1.1.3 Pengeluaran Lembaga Swasta Nirlaba	4
1.1.4 Pengeluaran Pemerintah	5
1.1.5 Pembentukan Modal Tetap Bruto	6
1.1.6 Perubahan Inventori	7
1.1.7 Ekspor dan Impor	8
1.2. METODE PENGHITUNGAN	9
1.2.1 PDRB menurut Penggunaan	9
1.2.2 Konsumsi Rumah tangga	10
1.2.3 Pengeluaran Lembaga Swasta Nirlaba	13
1.2.4 Konsumsi Pemerintah	13
1.2.5 Pembentukan Modal Tetap Bruto	15
1.2.6 Perubahan Inventori	16
1.2.7 Ekspor dan Impor	16
BAB II. ULASAN SINGKAT	
2.1 PDRB Menurut Penggunaan	17
2.2 Konsumsi Rumah tangga	19
2.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	20
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori	22
2.5 Ekspor dan Impor Barang dan Jasa	25

DAFTAR LAMPIRAN TABEL

No. Lampiran	Judul Tabel	Hal
Lampiran 1.1	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan Kota Makassar Tahun 2006-2010 (dalam Juta Rupiah), berdasarkan harga berlaku.	28
Lampiran 1.2	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan Kota Makassar Tahun 2006-2010 (dalam Juta rupiah), berdasarkan harga konstan 2000.	29
Lampiran 2.1	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Menurut penggunaan Kota Makassar Tahun 2006-2010 (dalam Persentase), berdasarkan harga berlaku.	30
Lampiran 2.2	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Menurut penggunaan Kota Makassar Tahun 2006-2010 (dalam Persentase), berdasarkan harga konstan 2000.	31
Lampiran 3.1	Indeks Berantai PDRB Menurut Penggunaan Kota Makassar Tahun 2006-2010 (dalam Persentase), berdasarkan harga berlaku.	32
Lampiran 3.2	Indeks Berantai PDRB Menurut Penggunaan Kota Makassar Tahun 2006-2010 (dalam Persentase), berdasarkan harga konstan 2000.	33
Lampiran 4	Indeks Implisit PDRB Menurut Penggunaan Kota Makassar Tahun 2006-2010 (dalam Persentase)	34

BAB. I

KONSEP DEFINISI DAN METODE PENGHITUNGAN

1.1. Konsep Definisi

1.1.1. PDRB Menurut Penggunaan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut penggunaan sering juga disebut PDRB menurut permintaan atau PDRB menurut pengeluaran. Dipandang dari sisi penggunaan, PDRB merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang digunakan habis di suatu wilayah selama satu tahun. Yang dimaksud dengan barang yang digunakan habis (barang jadi) adalah barang yang tidak digunakan untuk proses kembali oleh suatu industri, tetapi untuk dikonsumsi oleh penduduk. Oleh karena itu barang setengah jadi tidak termasuk dalam penghitungan PDRB penggunaan, karena digunakan untuk diproses kembali menjadi barang jadi, sehingga nilai barang tersebut sudah termasuk di dalam barang jadi yang dihasilkan.

Dipandang dari sisi pengeluaran, PDRB merupakan jumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh institusi pada suatu wilayah selama satu tahun. Institusi tersebut terdiri dari rumah tangga, perusahaan dan pemerintah serta luar negeri

(wilayah). Jadi secara umum PDRB penggunaan terdiri dari empat jenis pengeluaran yaitu; konsumsi rumah tangga, investasi, pemerintah, dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor). Komponen lengkap PDRB menurut penggunaan adalah pengeluaran konsumsi rumahtangga, pengeluaran lembaga swasta yang tidak mencari untung (nirlaba), pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto.

Penghitungan PDRB menurut penggunaan disajikan dalam dua versi penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 2000. Penghitungan atas dasar harga berlaku adalah penghitungan terhadap seluruh komponen PDRB yang dinilai atas dasar harga pada masing-masing tahun. Sedangkan penghitungan atas dasar harga konstan tahun 2000 adalah penghitungan terhadap seluruh komponen PDRB yang dinilai atas dasar harga pada tahun 2000. Komponen PDRB menurut penggunaan atas dasar harga berlaku memberikan gambaran tentang agregat permintaan pada tahun tersebut, sedangkan berdasarkan harga konstan mencerminkan tentang nilai riil pada tahun tertentu.

1.1.2. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga meliputi semua pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa yang tujuannya hanya untuk dikonsumsi, setelah dikurangi hasil penjualan neto dari barang bekas atau apkiran yang dilakukan oleh rumah tangga yang berdomisili di suatu wilayah dalam periode waktu satu tahun.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan. Pengeluaran untuk konsumsi makanan, seperti bahan makanan, minuman, rokok, tembakau dan sebagainya, sedangkan pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan seperti barang tahan lama, pakaian, bahan bakar, jasa-jasa, pemeliharaan kesehatan, pendidikan, rekreasi, pengangkutan dan sebagainya. Pengeluaran rumah tangga tersebut untuk dikonsumsi jadi bukan digunakan untuk keperluan usaha, dan seandainya terdapat pembelian/pengeluaran rumah tangga yang diperuntukan untuk keperluan usaha maka harus dikeluarkan. Pembelian rumah dan perbaikan besar untuk rumah tidak termasuk pengeluaran konsumsi, melainkan sebagai pembentukan modal, tetapi pengeluaran atas rumah yang ditempati seperti sewa rumah, perbaikan ringan, pembayaran rekening air, listrik telepon dan lain-lain dimasukkan sebagai pengeluaran rumah tangga.

1.1.3. Pengeluaran Lembaga Swasta Nirlaba

Lembaga swasta yang tidak mencari untung (Nirlaba) adalah lembaga atau badan swasta yang memberikan pelayanan atau jasa kepada masyarakat seperti organisasi serikat buruh, persatuan para ahli, organisasi politik, badan keagamaan, lembaga penelitian, pendidikan, kesehatan, dan organisasi-organisasi kesejahteraan masyarakat yang khusus melayani masyarakat dan tidak mengutamakan keuntungan/nonkomersial. Yang dimaksud dengan nonkomersial adalah lembaga nirlaba yang menjual jasa layanannya pada tingkat dibawah harga pasar; yaitu harga yang tidak didasarkan atas biaya produksi, bahkan kadangkala layanan yang diberikan dengan cuma-cuma.

Pengeluaran lembaga swasta nirlaba meliputi semua pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa, pembayaran upah dan gaji, penerimaan transfer, penyusutan dan pajak tak langsung neto dikurangi dengan penjualan barang bekas. Pada umumnya sumber pembiayaan dari lembaga ini berasal dari sumbangan dan bantuan perorangan, masyarakat, organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri dan pemerintah. Apabila bantuan dana dan pengawasan sepenuhnya atau sebagian besar dari pemerintah maka lembaga ini dimasukkan ke dalam konsumsi pemerintah.

1.1.4. Pengeluaran Pemerintah

Yang dimaksud dengan pemerintah adalah sistem yang menjalankan dan mengatur kegiatan pemerintahan dalam menyediakan jasa pelayanan umum kepada masyarakat, seperti kegiatan administrasi pemerintahan, menjaga kestabilan keamanan negara, meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat, mengatur ekonomi dan lain-lain.

Pemerintah sebagai konsumen akhir mencakup departemen, lembaga bukan departemen pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa. Pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi dan pertahanan. Pengeluaran ini berupa belanja pegawai, penyusutan barang modal, belanja barang dan jasa. Belanja barang disini termasuk biaya perjalanan dinas, pemeliharaan dan pengeluaran lain yang bersifat rutin; artinya biaya-biaya yang dikeluarkan habis digunakan dalam proses produksi/pelayanan masyarakat.

Pengeluaran untuk belanja pegawai yaitu pengeluaran pemerintah untuk pembayaran upah dan gaji dalam bentuk uang dan barang beserta tunjangannya, iuran jaminan sosial, dana pensiun, asuransi kecelakaan, tabungan hari tua dan sejenisnya

1.1.5. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) adalah pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri, termasuk juga perbaikan besar barang modal yang menyebabkan bertambahnya umur pemakaian atau bertambahnya kapasitas produksi, dikurangi penjualan barang modal bekas.

Barang modal adalah barang atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi dan mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih. Oleh karena itu disebut sebagai barang modal tetap, sedangkan bruto mencerminkan bahwa penghitungan PMTB belum dikurangi penyusutan barang modal.

Pembentukan modal disini termasuk margin perdagangan dan biaya pengangkutan, biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pemindahan hak milik dalam transaksi jual beli barang-barang modal. Termasuk juga dalam pembentukan modal tetap bruto adalah pengeluaran untuk meningkatkan pendayagunaan seperti pembukaan tanah untuk lahan pertanian dan perluasan areal pertambangan.

Pembentukan modal tetap bruto menggambarkan investasi domestik fisik yang telah direalisasikan pada suatu tahun tertentu

dalam bentuk berbagai jenis barang modal seperti bangunan, mesin-mesin, alat-alat perlengkapan angkutan dan lainnya.

1.1.6 Perubahan Inventori

Inventori (stok) adalah persediaan barang pada akhir tahun yang menggambarkan output suatu sektor yang belum selesai diproses, diperoleh dari pembelian yang akan digunakan sebagai input pada suatu kegiatan ekonomi ataupun untuk dijual kembali. Selain itu, termasuk juga barang-barang yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang belum terjual, barang tersebut baik berbentuk barang jadi maupun barang setengah jadi. Inventori termasuk sebagai bagian dari investasi karena inventori termasuk dalam modal kerja yang merupakan bagian dari investasi yang direncanakan. Perubahan inventori adalah jumlah persediaan barang pada akhir tahun dikurangi dengan jumlah persediaan barang pada awal tahun.

Data tentang inventori dari berbagai jenis barang masih sangat sulit diperoleh, sehingga komponen perubahan inventori dalam PDRB penggunaan masih merupakan perkiraan kasar, karena dihitung dari hasil penjumlahan nilai tambah bruto PDRB sektoral dikurangi dengan komponen PDRB penggunaan lainnya.

Sehingga nilai perubahan inventori tersebut masih terkandung selisih statistik.

1.1.7 Ekspor & Impor

Ekspor dan impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa penduduk antar Provinsi dan atau dengan penduduk negara lain. Yang dimaksud dengan ekspor dan impor disini batasan wilayahnya adalah antar Provinsi dan luar negeri. Transaksi antar Provinsi adalah transaksi barang dan jasa yang terjadi antar wilayah provinsi di Indonesia, sedangkan luar negeri adalah transaksi yang terjadi antar negara.

Ekspor barang dinilai menurut harga *Free on Board* (FOB) sedangkan impor menurut *Cost Insurance Freight* (CIF). Yang dimaksud dengan FOB adalah penyerahan barang antara eksportir dengan importir, dengan penetapan harga dihitung berdasarkan nilai barang ditambah dengan semua biaya sampai barang berada di atas kapal. Biaya yang menjadi tanggungan pihak penjual terdiri atas bea pajak ekspor, biaya pengangkutan komoditas dari gudang penjual ke dermaga pelabuhan, biaya muat dari dermaga ke atas kapal serta biaya memadatkan atau menyusun komoditas. Sedangkan yang dimaksud dengan CIF adalah penyerahan barang diantara eksportir dengan importir, dimana harga jual sudah

mencakup harga pokok barang yang bersangkutan serta ongkos transportasi. Artinya eksportir mengatur dan menanggung semua biaya yang dikeluarkan dalam pengiriman barang dari tempat pelaku ekspor ke tempat pelaku impor.

Penghitungan ekspor maupun impor nilainya diperoleh dalam satuan kurs dolar US, sehingga perlu dikonversi ke dalam satuan rupiah. Untuk konversi nilai ekspor digunakan rata-rata kurs beli US\$ bulanan, sedangkan impor digunakan rata-rata kurs jual US\$ bulanan.

1.2. METODE PENGHITUNGAN

1.2.1. PDRB menurut Penggunaan

Seperti telah dijelaskan terlebih dahulu, bahwa dipandang dari sisi penggunaan, PDRB merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang digunakan habis di suatu wilayah selama satu tahun. Dengan demikian dapat diformulasikan dalam model persamaan sebagai berikut;

$$Y = C + I + E - M$$

$$C = C_r + C_n + C_p$$

$$I = I_f + I_s$$

Dimana,

Y = Produk Domestik Regional Bruto

C = Konsumsi

C_r = Konsumsi Rumah tangga

C_n = Konsumsi Nirlaba

C_p = Konsumsi Pemerintah

I = Pembentukan Modal

I_f = Pembentukan Modal Tetap Bruto

I_s = Perubahan inventori

E = Ekspor

M = Impor

1.2.2. Konsumsi Rumah tangga

Seperti telah diungkapkan sebelumnya, konsumsi rumahtangga terdiri dari dua komponen yaitu untuk pengeluaran makanan dan bukan makanan. Sumber data yang digunakan adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Metode penghitungan untuk konsumsi makanan digunakan adalah gabungan dari metode langsung dan penilaian harga eceran/harga yang dibayar oleh rumah tangga. Metode tersebut digunakan untuk memperkirakan konsumsi rumah tangga perkapita per jenis barang selama satu tahun. Data konsumsi yang dipakai

adalah rata-rata konsumsi perkapita dalam kuantum selama seminggu. Untuk memperoleh selama satu tahun rata-rata konsumsi tersebut dikali dengan 52. Sedangkan untuk memperoleh perkiraan konsumsi pada tahun-tahun yang tidak dilaksanakan survei (susenas) dengan modul pengeluaran maka dilakukan perkiraan dengan cara menghitung elastisitas konsumsi perjenis barang.

Model regresi yang digunakan untuk memperkirakan koefisien elastisitas konsumsi perkapita tersebut adalah :

$$Q_i = aY_i^b$$

Dimana;

Q_i = Rata-rata Konsumsi dalam kuantum

Y_i = Rata-rata Pendapatan

a = Konstanta

b = Koefisien Elastisitas

i = Komoditas ke-i

Setelah itu, dihitung perkiraan konsumsi perkapita dengan rumus sebagai berikut;

$$C(n+1) = C_n + (b \times dp(n+1) \times C_n)$$

Dimana;

C (n+1) = Rata-rata konsumsi (kuantum) perkapita sebulan tahun (n + 1)

C_n = Rata-rata konsumsi (kuantum) perkapita sebulan tahun dasar (n)

b = Koefisien Elastisitas

dp (n+1) = Perubahan pendapatan perkapita harga konstan tahun ke n dan n+1

Metode penghitungan untuk memperkirakan konsumsi bukan makanan, caranya hampir sama dengan perkiraan konsumsi makanan. Bedanya hanya terdapat pada model regresinya, dimana pada konsumsi bukan makanan digunakan model regresi linier sederhana;

$$Q_i = a + bY_i$$

Dimana;

Q_i = Rata-rata Konsumsi perkapita sebulan (Rp.)

Y_i = Rata-rata Pendapatan perkapita sebulan

a = Konstanta

b = Koefisien Elastisitas

I = Komoditas ke-i

1.2.3. Pengeluaran Lembaga Swasta Nirlaba

Produksi lembaga swasta nirlaba adalah biaya antara ditambah dengan nilai tambah bruto, sedangkan pengeluarannya adalah output dikurangi dengan penerimaan hasil penjualan barang produksi dan penerimaan atas pelayanan jasa. Penghitungan pengeluaran lembaga swasta nirlaba ini, dengan menjumlahkan semua output atau pengeluaran. Sumber data diperoleh dari sub sektor jasa sosial kemasyarakatan dari PDRB sektoral.

1.2.4. Konsumsi Pemerintah

Sumber data yang digunakan dalam penghitungan besarnya konsumsi pemerintah adalah; pengeluaran pemerintah pusat dan pertahanan, realisasi pengeluaran daerah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintahan desa, serta jumlah pegawai negeri pusat dan daerah.

Metode penghitungan dalam memperkirakan besarnya pengeluaran konsumsi pemerintah sama dengan total output dikurangi dengan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan pemerintahan yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan pemerintahan.

Terdapat dua tahap penghitungan konsumsi pemerintahan sebagai berikut:

- ☞ Untuk pengeluaran konsumsi pemerintah pusat dan pertahanan keamanan di daerah dilakukan dengan cara alokasi (alokatornya adalah jumlah pegawai negeri).
- ☞ Untuk pengeluaran konsumsi pemerintah di daerah diperoleh dari pengeluaran kelompok rutin dan pembangunan. Cara penghitungannya dapat diformulasikan sebagai berikut;

$$K_p = G_p + 0,0575 G_b + B_r + 0,0913 B_p + P_r + P_d + S_{gp} - P_{bj}$$

Dimana ;

G_p = Belanja Pegawai dari belanja rutin

G_b = Belanja pegawai dari belanja pembangunan

B_r = Belanja barang dari belanja rutin

B_p = Belanja barang dari belanja pembangunan

P_r = Perbaikan ringan dan pemeliharaan rutin

P_d = Perjalanan dinas dsb

S_{gp} = Penyusutan dari belanja pegawai ($0,05G_b$)

P_{bj} = Penerimaan Barang dan jasa

1.2.5. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap bruto dapat dibedakan atas :

- i. Pembentukan modal dalam bentuk bangunan/konstruksi
- ii. Pembentukan modal dalam bentuk mesin dan peralatan.

Metode yang digunakan dalam penghitungan pembentukan modal tetap bruto adalah pendekatan arus barang. Untuk mengestimasi pembentukan modal dalam bentuk bangunan/konstruksi diperoleh dengan menggunakan rasio sebesar 0,9157 dari output sektor konstruksi yang merupakan pembentukan modal. Sedangkan pembentukan modal dalam bentuk mesin dan peralatan diperoleh dengan cara ekstrapolasi.

1.2.6. Perubahan Inventori

Nilai perubahan inventori dalam komponen penggunaan PDRB masih merupakan selisih statistik. Perhitungan dari PDRB hasil penjumlahan nilai tambah bruto sektoral dikurangi dengan komponen permintaan akhir lainnya.

1.2.7. Ekspor dan Impor

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan ekspor dan impor bersumber dari Publikasi Statistik Ekspor dan Impor yang diterbitkan oleh BPS untuk perdagangan luar negeri, sedangkan

perdagangan antar pulau/provinsi dari Publikasi Bongkar Muat Provinsi Sulawesi Selatan yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai tukar rupiah terhadap US \$ baik nilai jual maupun beli diperoleh dari Laporan Perbankan Bank Indonesia Makassar.

Metode estimasi untuk komponen ekspor dan impor dilakukan dengan menghitung nilai ekspor dan impor barang dan jasa (masih dalam US\$), setelah nilai ekspor dan impor diperoleh maka dikonversi dengan nilai rupiah. Untuk ekspor menggunakan nilai rata-rata kurs beli, sedangkan impor menggunakan kurs jual.

BAB II

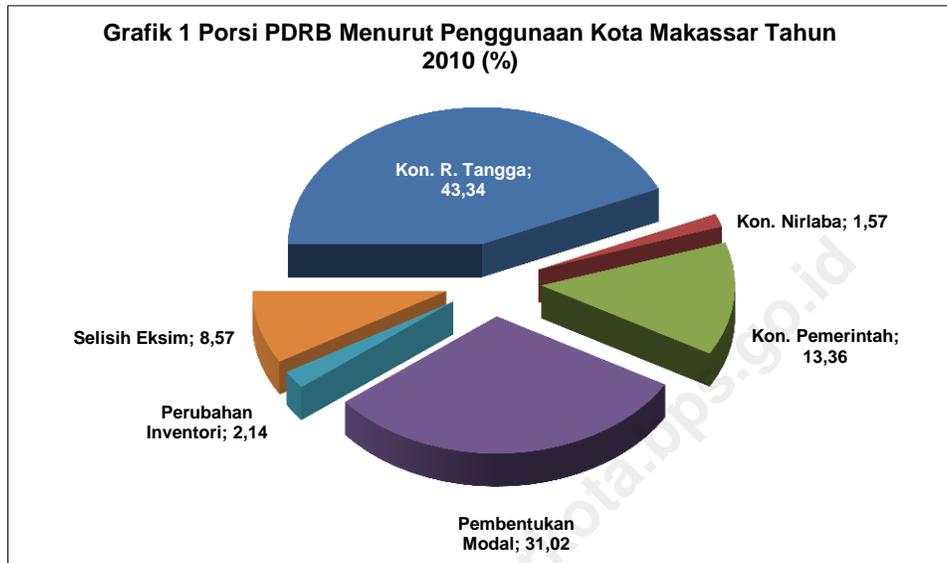
ULASAN SINGKAT

2.1. PDRB Menurut Penggunaan

Salah satu indikator untuk melihat kemajuan perekonomian Kota Makassar dapat dilihat dari perkembangan PDRB-nya. Pada tahun 2010 PDRB Kota Makassar atas dasar harga berlaku telah mencapai 37.007,45 milyar rupiah, meningkat sekitar 18,37 persen bila dibanding dengan tahun 2009. Untuk mengetahui kemajuan perekonomian Kota Makassar secara riil dapat dilihat dari perkembangan PDRB atas dasar harga konstan. Selama kurun waktu tahun 2006-2010 terjadi peningkatan perekonomian sebesar 43,30 persen, yaitu dari 11.341.848,22 milyar rupiah pada tahun 2006 menjadi 16.252.451,43 milyar rupiah pada tahun 2010. Dengan demikian dalam periode 2006–2010, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar rata-rata 9,15 persen pertahun, dan khusus tahun 2010 pertumbuhannya sebesar 9,83 persen.

Total PDRB Kota Makassar atas dasar harga berlaku yang mencapai 37.007,45 milyar pada tahun 2010, sebagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 16.037,24 milyar rupiah atau 43,34 persen. Tingginya pengeluaran

konsumsi rumahtangga tersebut memberikan konstribusi yang cukup besar terhadap permintaan barang dan jasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar.



Komponen penggunaan PDRB yang cukup besar selain konsumsi rumah tangga adalah konsumsi pemerintah yang mencapai 4.944,82 milyar rupiah atau 13,36 persen, pembentukan modal sebesar 11.480,21 milyar rupiah atau 31,02 persen, dan permintaan ekspor barang dan jasa sebesar 28.350,25 milyar rupiah atau 76,61 persen. Kemudian dibutuhkan impor sebesar 25.178,13 milyar rupiah atau 68,04 persen untuk memenuhi seluruh permintaan barang dan jasa di Kota Makasar. Komponen

PDRB penggunaan lainnya adalah perubahan stok yaitu sekitar 2,14 persen.

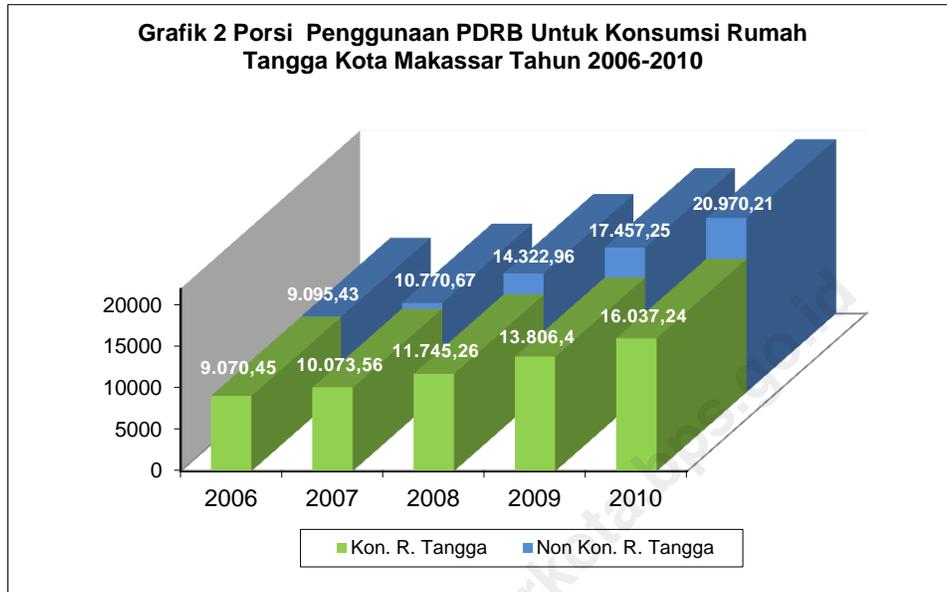
2.2. Konsumsi Rumah tangga

Seiring dengan meningkatnya pendapatan perkapita, pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga juga mengalami peningkatan. Dari total angka PDRB Kota Makassar, sebagian besar digunakan untuk non konsumsi rumah tangga.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase pengeluaran konsumsi rumahtangga atas dasar harga berlaku terhadap total PDRB mengalami penurunan, sebaliknya persentase pengeluaran non konsumsi rumahtangga mengalami peningkatan.

Pada tahun 2006 pengeluaran konsumsi ruamahtangga sebesar 9.070,45 milyar rupiah atau sekitar 49,93 persen, sementara non konsumsi rumahtangga sebesar 9.095,43 milyar rupiah atau sekitar 50,07 persen dari total PDRB. Begitu juga tahun 2010 meningkat menjadi 16.037,24 milyar rupiah atau sekitar 43,34 persen, sementara non konsumsi rumahtangga sebesar 20.970,21 milyar rupiah atau sekitar 56,66 persen dari total PDRB. Dengan melihat tren pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran lainnya, menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun sebagian besar PDRB Kota Makassar digunakan antara lain untuk konsumsi

lembaga nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal, ekspor, import dan perubahan stok.



2.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan akumulasi dari pengeluaran pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa. Komponen pengeluaran konsumsi pemerintah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan penyusutan.

Distribusi komponen neraca produksi terhadap pengeluaran konsumsi pemerintah dari seluruh kegiatan pemerintahan di wilayah Kota Makassar dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Neraca Pemerintahan Atas Dasar Harga Berlaku 2006-2010
(Milyar rupiah)

JENIS PENGELUARAN						Rasio Thd Kon. Pemerintah 2006-2010 (%)
	2006	2007	2008	2009	2010	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pengeluaran Pemerintah	2.522	2.865	4.125	4.612	5.111	102,60
▪ Belanja Barang	990	812	1.169	1.409	1.616	31,98
▪ Belanja Pegawai	1.484	2.001	2.872	3.161	3.416	68,99
▪ Penyusutan	48	51	84	42	79	1,62
B. Penerimaan Barang/Jasa (-)	17	62	95	147	166	2,60
KONSUMSI PEMERINTAH	2.505	2.803	4.030	4.465	4.945	100
PERSENTASE THD PDRB	13,79	13,48	15,46	14,28	13,36	XXXXXXX

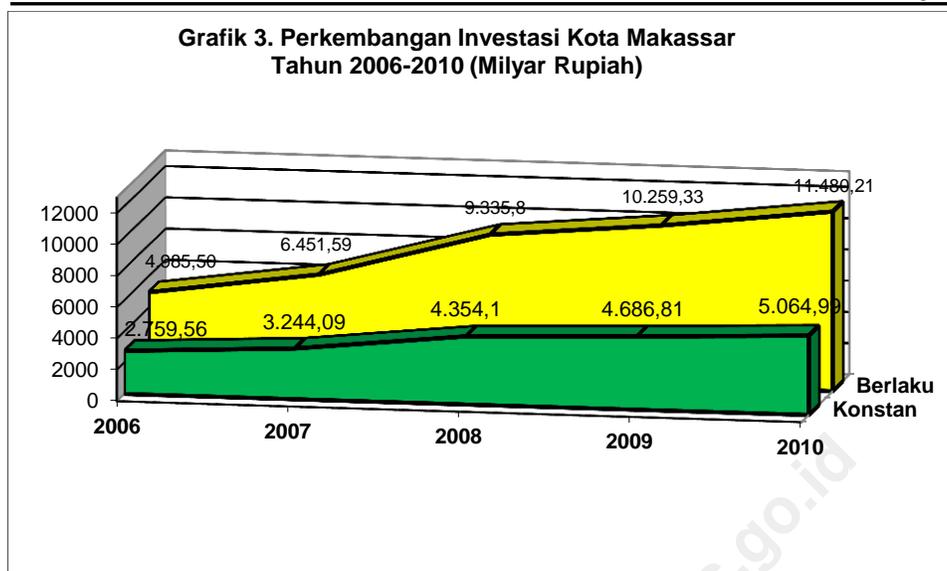
Pada tabel di atas terlihat belanja pegawai merupakan komponen yang paling dominan dalam pembentukan konsumsi pemerintah. Dalam periode tahun 2006-2010 porsi belanja pegawai rata-rata 68,99 persen pertahun. Pada tahun 2006 besarnya belanja pegawai sebesar 1.484 milyar rupiah dan meningkat menjadi 3.416 milyar rupiah pada tahun 2010 atau meningkat rata-

rata 32,55 persen pertahun. Komponen lain yang memiliki porsi relatif besar adalah belanja barang, yaitu dalam periode tahun 2006 hingga 2010 cenderung meningkat setiap tahun kecuali tahun 2007 mengalami penurunan dibanding tahun 2006. Pada tahun 2006 komponen tersebut masih sekitar 990 milyar rupiah, meningkat menjadi 1.616 milyar rupiah pada tahun 2010 atau meningkat rata-rata 15,81persen pertahun.

Seiring dengan meningkatnya belanja barang dan belanja pegawai, maka pengeluaran konsumsi pemerintah juga cenderung meningkat setiap tahun, yaitu pada tahun 2006 komponen tersebut masih sekitar 2.505 milyar rupiah, meningkat menjadi 4.945 milyar rupiah pada tahun 2010 atau meningkat rata-rata 24,35 persen pertahun.

2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap bruto atau dikenal dengan investasi fisik merupakan komponen penggunaan PDRB yang berkaitan erat dengan proses kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan produksi dimasa yang akan datang. Dalam uraian berikut pembentukan modal tetap bruto tidak termasuk komponen perubahan stok, karena komponen tersebut masih termasuk diskrepansi statistik.



Pada tabel lampiran dalam publikasi ini komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan perubahan stok (PS) rinciannya tetap dipisahkan, hal ini dilakukan agar dapat dilihat masing-masing perkembangannya.

Dalam kurun waktu 2006-2010, besarnya investasi (PMTB) menurut harga berlaku rata-rata tumbuh 28,52 persen pertahun, sedangkan secara riil rata-rata tumbuh 17,34 persen pertahun. Dalam periode tersebut, besarnya investasi terus mengalami peningkatan, sebagai ilustrasi, pada tahun 2006 investasi menurut harga berlaku sebesar 4.985,55 milyar rupiah meningkat menjadi 11.480,21 milyar rupiah pada tahun 2010. Sedangkan secara riil

pada tahun 2006 sebesar 2.759,56 milyar rupiah menjadi 5.064,99 milyar rupiah pada tahun 2010.

**Tabel 3. Perkembangan Nilai Investasi Kota Makassar, 2006-2010
(Milyar rupiah)**

Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Berlaku					
a Investasi	4.985,56	6.451,59	9.335,80	10.259,33	11.480,21
b Tumbuh (%)	46,67	29,41	24,71	9,89	11,90
c Andil (%)	27,44	30,95	35,81	32,82	31,02
2. Konstan					
a Investasi	2.759,79	3.244,09	4.354,10	4.686,81	5.064,99
b Tumbuh (%)	19,21	17,56	34,22	7,64	8,07
c Andil (%)	24,33	26,46	32,13	31,67	31,16

Porsi investasi dalam PDRB penggunaan pada tahun 2006 menurut harga berlaku dan harga konstan masing-masing sekitar 27,44 persen dan 24,33 persen, kemudian mengalami pergeseran menjadi 31,02 persen untuk harga berlaku dan 31,16 persen untuk harga konstan pada tahun 2010. Bila diamati porsi tersebut dari

tahun 2006 hingga tahun 2010 tampaknya mempunyai pola yang berfluktuasi.

Melihat perkembangan investasi yang secara riil tumbuh sekitar 17,34 persen pertahun dalam periode 2006-2010, ternyata telah mampu mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi rata-rata 9,15 persen pertahun dalam periode yang sama.

2.5. Ekspor dan Impor Barang dan Jasa

Ekspor merupakan kegiatan ekonomi yang mengakibatkan arus barang dan jasa keluar dari suatu wilayah. Sedangkan impor adalah kejadian yang sebaliknya, yaitu kegiatan ekonomi yang mengakibatkan arus barang dan jasa masuk ke suatu wilayah. Dalam hal ini baik ekspor maupun impor Kota Makassar terbagi tiga, yaitu yang berhubungan dengan negara lain yang disebut 'antar negara' yang berhubungan dengan propinsi lain yang disebut 'antar propinsi' dan yang berhubungan dengan kabupaten/kota lain 'antar kabupaten' yang kemungkinannya bisa melalui darat, laut, dan udara.

Pada tahun 2006, total nilai ekspor Kota Makassar atas dasar harga berlaku sebesar 14.410,34 milyar rupiah yang terdiri dari ekspor antar negara sebesar milyar 5.104,50 rupiah, ekspor antar propinsi sebesar milyar 2.379,74 rupiah dan ekspor antar kabupaten

6.926,09 milyar rupiah. Hingga tahun 2008, angka itu meningkat menjadi 19.404,38 milyar rupiah yang terdiri dari ekspor antar negara sebesar 6.713,94 milyar, ekspor antar propinsi sebesar 2.875,100 milyar rupiah dan ekspor antar kabupaten 9.815,34 milyar rupiah. Selanjutnya pada tahun 2010, nilai ekspor Kota Makassar meningkat dengan pesat, sehingga mencapai 28.350,25 milyar rupiah yang terdiri dari ekspor antar negara 8.884,74 milyar rupiah ekspor antar propinsi 4.203,97 milyar rupiah dan ekspor antar kabupaten 15.261,54 milyar rupiah.

Peningkatan nilai ekspor yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir terjadi karena meningkatnya volume komoditi baik ekspor antar negara, propinsi maupun kabupaten.

Seiring dengan meningkatnya nilai total ekspor Kota Makassar, impor juga cenderung meningkat dalam kurun waktu yang sama. Pada tahun 2006 nilai Impor Kota Makassar atas dasar harga berlaku sebesar 14.128,94 milyar rupiah yang terdiri dari impor antar negara 1.986,02 milyar rupiah impor antar propinsi 7.087,61 milyar rupiah dan impor antar Kabupaten/kota 5.055,31 milyar rupiah. Hingga tahun 2008, angka itu meningkat menjadi 19.656,44 milyar rupiah yang terdiri dari impor antar negara 3.463,49 milyar rupiah impor antar propinsi 9.228,97 milyar rupiah dan impor antar kabupaten/kota 6.963,97 milyar rupiah. Pada tahun 2010, nilai impor Kota makassar juga meningkat dengan pesat sehingga mencapai 25.178,13 milyar rupiah yang terdiri dari impor

antara negara 4.493,51 milyar rupiah impor antara propinsi 11.775,29 milyar rupiah dan impor antar kabupaten/kota 8.909,32 milyar rupiah.

Tabel 4. Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor ADHB Kota Makassar 2006-2010 (milyar rupiah)

Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Ekspor	14.410,34	17.201,28	19.404,38	23.713,71	28.350,25
a. Antar Negara	5.104,50	5.278,99	6.713,94	7.710,39	8.884,74
b. Antar Propinsi	2.379,74	2.619,35	2.875,10	3.525,88	4.203,97
c. Antar Kab/Kota	6.926,10	9.302,95	9.815,34	12.477,44	15.261,54
2. Impor	14.128,94	16.652,91	19.656,44	21.942,17	25.178,13
a. Antar Negara	1.986,02	2.294,71	3.463,49	3.953,80	4.493,51
b. Antar Propinsi	7.087,61	8.299,53	9.228,97	10.169,24	11.775,29
c. Antar Kab/Kota	5.055,31	6.058,67	6.963,97	7.819,14	8.909,32

Selisih antara nilai ekspor dengan impor Kota Makassar selama kurun waktu 2006-2010 menghasilkan surplus berkisar antara 281,40 milyar rupiah sampai dengan 3.172,12 milyar rupiah.

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku
Kota Makassar Tahun 2006-2010 (Juta Rp)

Komponen	2006	2007	2008	2009 *)	2010 **)
1 Konsumsi Rumah Tangga	9.070.447,70	10.073.562,06	11.745.264,60	13.806.396,50	16.037.244,17
a.Makanan	4.725.772,00	5.166.552,69	6.000.070,26	7.175.316	8.425.662,85
b.Bukan Makanan	4.344.675,70	4.907.009,37	5.745.194,34	6.631.080	7.611.581,32
2 Konsumsi Nirlaba	234.861,83	289.692,52	395.952,29	502.321,07	579.308,19
3 Konsumsi Pemerintah	2.504.881,56	2.803.092,71	4.030.043,51	4.465.343	4.944.818,50
4 Pembentukan Modal	4.985.550,05	6.451.586,29	9.335.798,65	10.259.334	11.480.210,76
5 Perubahan Stok	1.088.740,18	677.922,96	813.221,49	658.720,14	793.753,64
6 Ekspor	14.410.338,73	17.201.283,15	19.404.377,29	23.513.710,22	28.350.245,86
a.Antar Negara	5.104.503,95	5.278.991,60	6.713.935,88	7.710.392	8.884.737,73
b.Antar Propinsi	2.379.739,02	2.619.345,54	2.875.100,14	3.425.883	4.203.970,41
c.Antar kab/kota	6.926.095,76	9.302.946,02	9.815.341,26	12.377.436	15.261.537,71
7 Impor	14.128.943,72	16.652.906,60	19.656.436,32	21.942.173,30	25.178.129,19
a.Antar Negara	1.986.018,99	2.294.705,66	3.463.492,86	3.953.797	4.493.511,03
b.Antar Propinsi	7.087.613,89	8.299.531,23	9.228.973,65	10.169.236	11.775.293,31
c.Antar kab/kota	5.055.310,84	6.058.669,71	6.963.969,81	7.819.140	8.909.324,86
PDRB	18.165.876,32	20.844.233,09	26.068.221,49	31.263.651,66	37.007.451,92

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar

Catatan : *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Tabel 1.2 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan 2000
Kota Makassar Tahun 2006-2010 (Juta Rp)

Komponen	2006	2007	2008	2009 *)	2010 **)
1 Konsumsi Rumah Tangga	6.360.742,43	6.906.671,97	7.569.766,67	8.247.770,96	9.048.075,48
a.Makanan	3.379.780,80	3.583.720,77	3.990.004,43	4.354.941,24	4.741.768,90
b.Bukan Makanan	2.980.961,62	3.322.951,20	3.579.762,23	3.892.829,72	4.306.306,58
2 Konsumsi Nirlaba	151.542,44	166.682,38	196.056,30	228.955,79	247.764,87
3 Konsumsi Pemerintah	1.578.336,44	1.687.905,54	1.866.549,09	1.953.355,27	2.085.477,05
4 Pembentukan Modal	2.759.555,86	3.244.094,48	4.354.098,44	4.686.814,81	5.064.997,22
5 Perubahan Stok	409.585,36	436.218,36	497.952,54	363.394,65	328.027,50
6 Ekspor	9.112.297,88	9.530.409,07	9.778.697,27	10.910.726,96	12.024.957,93
a.Antar Negara	3.314.612,95	3.161.072,81	3.212.409,51	3.475.254,28	3.800.544,72
a.Antar Propinsi	1.450.220,14	1.498.709,90	1.569.952,22	1.702.032,05	1.915.123,04
c.Antar kab/kota	4.347.464,78	4.870.626,36	4.996.335,53	5.733.440,62	6.309.290,18
7 Impor	9.030.212,17	9.710.630,95	10.711.293,11	11.592.830,75	12.546.848,62
a.Antar Negara	1.340.752,46	1.495.003,05	1.712.124,62	1.844.270,99	1.996.616,76
b.Antar Propinsi	4.287.415,98	4.573.403,89	4.927.222,83	5.327.519,09	5.730.167,63
c.Antar kab/kota	3.402.043,73	3.642.224,02	4.071.945,66	4.421.040,68	4.820.064,23
PDRB	11.341.848,22	12.261.350,85	13.551.827,18	14.798.187,68	16.252.451,43

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar

Catatan : *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

29

Tabel 2.1 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Kota Makassar Tahun 2006-2010 (Juta Rp)

Komponen	2006	2007	2008	2009 *)	2010 **)
1 Konsumsi Rumah Tangga	49,93	48,33	45,06	44,16	43,34
a.Makanan	26,01	24,79	23,02	22,95	22,77
b.Bukan Makanan	23,92	23,54	22,04	21,21	20,57
2 Konsumsi Nirlaba	1,29	1,39	1,52	1,61	1,57
3 Konsumsi Pemerintah	13,79	13,45	15,46	14,28	13,36
4 Pembentukan Modal	27,44	30,95	35,81	32,82	31,02
5 Perubahan Stok	5,99	3,25	3,12	2,11	2,14
6 Ekspor	79,33	82,52	74,44	75,21	76,61
a.Antar Negara	28,10	25,33	25,76	24,66	24,01
b.Antar Propinsi	13,10	12,57	11,03	10,96	11,36
c.Antar kab/kota	38,13	44,63	37,65	39,59	41,24
7 Impor	77,78	79,89	75,40	70,18	68,04
a.Antar Negara	10,93	11,01	13,29	12,65	12,14
b.Antar Propinsi	39,02	39,82	35,40	32,53	31,82
c.Antar kab/kota	27,83	29,07	26,71	25,01	24,07
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar

Catatan : *) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

30

Tabel 2.2 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kota Makassar Tahun 2006-2010 (%)

Komponen	2006	2007	2008	2009 *)	2010 **)
1 Konsumsi Rumah Tangga	56,08	56,33	55,86	55,74	55,67
a.Makanan	29,80	29,23	29,44	29,43	29,18
b.Bukan Makanan	26,28	27,10	26,42	26,31	26,50
2 Konsumsi Nirlaba	1,34	1,36	1,45	1,55	1,52
3 Konsumsi Pemerintah	13,92	13,77	13,77	13,20	12,83
4 Pembentukan Modal	24,33	26,46	32,13	31,67	31,16
5 Perubahan Stok	3,61	3,56	3,67	2,46	2,02
6 Ekspor	80,34	77,73	72,16	73,73	73,99
a.Antar Negara	29,22	25,78	23,70	23,48	23,38
b.Antar Propinsi	12,79	12,22	11,58	11,50	11,78
c.Antar kab/kota	79,62	79,20	36,87	38,74	38,82
7 Impor	79,62	79,20	79,04	78,34	77,20
a.Antar Negara	11,82	12,19	12,63	12,46	12,29
b.Antar Propinsi	37,80	37,30	36,36	36,00	35,26
c.Antar kab/kota	30,00	29,70	30,05	29,88	29,66
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar

Catatan : *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Tabel 3.1 Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Kota Makassar Tahun 2006-2010 (%)

Komponen	2006	2007	2008	2009 *)	2010 **)
1 Konsumsi Rumah Tangga	111,51	111,06	116,59	117,55	116,16
a.Makanan	109,57	109,33	116,13	119,59	117,43
b.Bukan Makanan	113,70	112,94	117,08	115,42	114,79
2 Konsumsi Nirlaba	113,51	123,35	136,68	126,86	115,33
3 Konsumsi Pemerintah	121,09	111,91	143,77	110,80	110,74
4 Pembentukan Modal	146,67	129,41	144,71	109,89	111,90
5 Perubahan Stok	124,98	62,27	119,96	81,00	120,50
6 Ekspor	124,78	119,37	112,81	121,18	120,57
a.Antar Negara	123,03	103,42	127,18	114,84	115,23
b.Antar Propinsi	119,40	110,07	109,76	119,16	122,71
c.Antar kab/kota	128,11	134,32	105,51	126,10	123,30
7 Impor	134,77	117,86	118,04	111,63	114,75
a.Antar Negara	124,72	115,54	150,93	114,16	113,65
b.Antar Propinsi	130,00	117,10	111,20	110,19	115,79
c.Antar kab/kota	146,97	119,85	114,94	112,28	113,94
PDRB	115,38	114,74	125,06	119,93	118,37

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar

Catatan : *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

32

Tabel 3.2 Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kota Makassar Tahun 2006-2010 (%)

Komponen	2006	2007	2008	2009 *)	2010 **)
1 Konsumsi Rumah Tangga	109,95	108,58	109,60	108,96	109,70
a.Makanan	108,28	106,03	111,34	109,15	108,88
b.Bukan Makanan	111,91	111,47	107,73	108,75	110,62
2 Konsumsi Nirlaba	105,28	109,99	117,62	116,78	108,22
3 Konsumsi Pemerintah	105,59	106,94	110,58	104,65	106,76
4 Pembentukan Modal	119,21	117,56	134,22	107,64	108,07
5 Perubahan Stok	120,01	106,50	114,15	72,98	90,27
6 Ekspor	115,87	104,59	102,61	111,58	110,21
a.Antar Negara	115,84	95,37	101,62	108,18	109,36
b.Antar Propinsi	109,49	103,34	104,75	108,41	112,52
c.Antar kab/kota	118,19	112,03	102,58	114,75	110,04
7 Impor	121,18	107,53	110,30	108,23	108,23
a.Antar Negara	125,46	111,50	114,52	107,72	108,26
b.Antar Propinsi	123,94	106,67	107,74	108,12	107,56
c.Antar kab/kota	116,35	107,06	111,80	108,57	109,03
PDRB	108,09	108,11	110,52	109,20	109,83

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar

Catatan : *) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Tabel 4. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan Kota Makassar Tahun 2006-2010 (%)

Komponen	2006	2007	2008	2009 *)	2010 **)
1 Konsumsi Rumah Tangga	142,60	145,85	155,16	167,40	177,24
a.Makanan	139,82	144,17	150,38	164,76	177,69
b.Bukan Makanan	145,75	147,67	160,49	170,34	176,75
2 Konsumsi Nirlaba	154,98	173,80	201,96	219,40	233,81
3 Konsumsi Pemerintah	158,70	166,07	215,91	228,60	237,11
4 Pembentukan Modal	180,66	198,87	214,41	218,90	226,66
5 Perubahan Stok	265,82	155,41	163,31	181,27	241,98
6 Ekspor	158,14	180,49	198,44	215,51	235,76
a.Antar Negara	154,00	167,00	209,00	221,87	233,78
b.Antar Propinsi	164,10	174,77	183,13	201,28	219,51
c.Antar kab/kota	159,31	191,00	196,45	215,88	241,89
7 Impor	156,46	171,49	183,51	189,27	200,67
a.Antar Negara	148,13	153,49	202,29	214,38	225,06
b.Antar Propinsi	165,31	181,47	187,31	190,88	205,50
c.Antar kab/kota	148,60	166,35	171,02	176,86	184,84
PDRB	160,17	170,00	192,36	211,27	227,70

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar

Catatan : *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara